

**RENCANA KERJA**

**BADAN KESATUAN BANGSA**

**DAN POLITIK**

**KABUPATEN TEGAL**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2022. Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, menyusun dokumen Rencana Strategis mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan visi Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Politik, didukung Masyarakat yang demokratis dan menjunjung supremasi hukum. Dalam Renja Tahun 2022 ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang lebih baik dan berorientasi hasil.

Penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan - Badan Daerah Kabupaten Tegal;
4. Keputusan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

Kami menyadari RENJA ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena ini kami mengharap saran, kritik dan masukan dari semua belah pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Renja yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi informasi yang berguna bagi semua pihak.

Kepala Badan Kesatuan dan Politik  
Kabupaten Tegal



**Drs. ABASARI M.HUM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631029 198503 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2020.....	7
2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	15
2.4. Review Rancangan Awal Perangkat Daerah.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	21
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	21
3.3. Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB V. PENUTUP.....	26

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 merupakan dokumen penjabaran rencana program dan kegiatan tahunan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang memuat arah kebijakan keuangan Perangkat Daerah, strategi, kebijakan umum, dan prioritas program sesuai kemampuan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2022. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 merupakan pedoman arah kegiatan pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dan politik, Didukung Masyarakat Yang Demokratis Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal 1) Melaksanakan perumusan dan penyiapan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang kesatuan bangsa; 2) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang politik dan hubungan antar lembaga; 3. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang perlindungan masyarakat; dan 4) Melaksanakan pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana Kerja tersebut berdasarkan hasil analisis kebutuhan (*need assessment*) dan penjangkauan aspirasi para pemangku kepentingan (*stake holders*) melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) guna merealisasikan target dan sasaran sesuai dengan kerangka tujuan yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahun 2021 harus mengarah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang merupakan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPerangkat Daerah) selama kurun waktu tahun 2019-2024 dan

merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPerangkat Daerah) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025. ✓

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 yang akan dibahas dalam penyusunan sampai ditetapkan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2022.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pelaksanaan organisasi pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPerangkat Daerah) Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan - Badan Daerah Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
22. Keputusan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan panduan bagi seluruh komponen Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tegal dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai indikator dan tolok ukur kinerja, agar pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Tegal dapat tercapai yang juga mendorong tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 mempunyai maksud mewujudkan penyelenggaraan Management Pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, dituntut adanya pengelolaan manajemen pemerintah yang profesional, yang mampu menggerakkan semua sumber daya dan dana yang tersedia secara efisien dan efektif.

Sebagai upaya untuk mewujudkan maksud tersebut, maka ditetapkan tujuan Review Renstra sebagai berikut :

- a. Menjabarkan pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Menguraikan Rencana Kerja Perangkat Daerah rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal yang akan dibiayai melalui sumber pembiayaan APBD.
- d. Merupakan alat bantu bagi rujukan penilaian kinerja pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan tolok ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya atas kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2020**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan  
Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat  
Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV. PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pengukuran kinerja untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Tolok ukur yang dijadikan sebagai indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Indikator Kinerja Keuangan. Indikator Kinerja Kegiatan dipakai untuk menilai tingkat capaian kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcomes*), Manfaat (*Benefit*) dan Dampak (*Impact*). Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Hingga akhir tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

#### **a. Pengukuran Pencapaian Keuangan Kegiatan**

Anggaran yang digunakan untuk mamfasilitasi penanganan gangguan yang terjadi terhadap kenyamanan dan ketertiban umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal bersumber dari APBD total pagu anggaran sebesar Rp. 2.355.989.000 (Dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Capaian kinerja keuangan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

### **2.1.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **2.1.1. 1. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN KEGIATAN**

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada hasil laporan

kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal.

Adanya kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena pada Tahun Anggaran 2020 terjadi refocusing anggaran sehingga menyebabkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tidak maksimal melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi merupakan faktor penguat yang menyebabkan kinerja keuangan dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal melemah.

Oleh karena itu dipandang perlu mengambil Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu merencanakan ulang seluruh program dan kegiatan secara terstruktur agar serapan dan kinerja program kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal menjadi lebih maksimal.

Evaluasi Kinerja Program RKPerangkat Daerah Tahun 2020

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

<b>NO</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Target Renstra 2020 (Rp.)</b>	<b>Target 2020 (Rp.)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp.)</b>	<b>Prese ntase Penca paian (%)</b>	<b>Status Pencap aian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>					
<b>I</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>					

		<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan</b>						
	1	Kegiatan penyedia jasa kantor	88.092	88.092	64.419	73,13	Sedang	
	2	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kantor	125.338	125.338	107.220	85,55	Tinggi	
	3	Kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor	29.179	29.179	25.496	87,38	Tinggi	
	4	Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	-		
	5	Kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja	25.880	25.880	13.552	52,37	Rendah	
	6	Kegiatan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	67.355	67.355	62.040	92,11	Sangat Tinggi	
	7	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	56.100	56.100	53.099	94,65	Sangat Tinggi	
		<b>Program Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat</b>						
	1	Politik dan hubungan antar lembaga kesbangpol dan linmas	371.311	371.311	345.948	93,17	Sangat Tinggi	
	2	Kesatuan bangsa kesbangpol dan linmas	60.625	60.625	57.495	94,84	Sangat Tinggi	

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN KEGIATAN

2.1.1.2. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

NO	Program / Kegiatan	Target Renstra 2020	Target 2020 (setelah refocusing)	Realisasi 2020	Prese ntase Penca paian (%)	Status Pencap ian
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>					
<b>I</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>					
	<b>1 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan</b>					
	1 Kegiatan penyedia jasa kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	Sangat Tinggi
	2 Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	Sangat Tinggi
	3 Kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor	5 item	2 item	2 Item	100	Sangat Tinggi
	4 Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 orang	0 orang	0 orang	-	-
	5 Kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja	7 item	6 Item	6 Item	100	Sangat Tinggi

	6	Kegiatan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	Sangat Tinggi
	7	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	Sangat Tinggi
	<b>2</b>	<b>Program Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat</b>					
	1	Politik dan hubungan antar lembaga kesbangpol dan linmas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	Sangat Tinggi
	2	Kesatuan bangsa kesbangpol dan linmas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	Sangat Tinggi

**1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal

**2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

a. Jumlah Pegawai 21 orang

PNS/CPNS : 18 orang

PTT : 1 orang

THL : 2 orang

Kualifikasi Pendidikan

Pasca Sarjana (S2) : 5 orang

Sarjana (S1)/ DIV : 7 orang

Ahli Madya (DIII)/ Sarjana Muda : 0 orang

SMA : 8 orang

SD : 1 orang

b. Pangkat dan Golongan

Golongan IV : 5 orang

Golongan III : 8 orang

Golongan II	: 4 orang
Golongan I	: 1 orang
PTT	: 1 orang
THL	: 2 orang

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Struktural	: 8 orang
Fungsional	: - orang

### 3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi penanganan gangguan yang terjadi terhadap keamanan dan ketertiban umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.355.989.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

### 4. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam menanggulangi masalah gangguan-gangguan yang terjadi ditempuh dengan beberapa metode antara lain :

- a. Melakukan upaya mediasi bersama aparat yang berwenang terhadap konflik dan pertikaian yang terjadi;
- b. Meningkatkan pendekatan dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur pemuda untuk menangkal penyebaran paham kelompok radikal maupun teroris;
- c. Menggiatkan pemantauan terhadap gejala-gejala munculnya anggota radikal kanan dan radikal kiri melalui kegiatan Komunitas Intelijen Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan keberadaan Orang Asing;
- d. Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- e. Menggiatkan sosialisasi dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat guna menumbuhkan semangat persatuan kesatuan antar komponen bangsa dan rasa kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungannya dan guna menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan upaya deradikalisasi masing-masing komponen bangsa;

- f. Menggiatkan sosialisasi, diskusi dan koordinasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- g. Menggiatkan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba);
- h. Memverifikasi keabsahan keberadaan ormas dan LSM;
- i. Memverifikasi berkas ajukan penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian;  
Kendala dalam upaya penanggulangan gangguan-gangguan yang terjadi antara lain:
  - a. Terbatasnya pagu anggaran guna memfasilitasi jaringan koordinasi lintas sektoral seperti KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FPBI (Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Tim Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan orang asing yang membutuhkan biaya akomodasi yang tidak sedikit;
  - b. Untuk beberapa kasus upaya mediasi tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga dilanjutkan dengan upaya tegas dari aparat keamanan;
  - c. Kurang semangatnya peserta sosialisasi, diskusi dan koordinasi untuk menyebarluaskan hasil sosialisasi, diskusi dan koordinasi kepada masyarakat secara luas sehingga dampak yang signifikan sulit dicapai;
  - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tanggap cepat dan lapor cepat apabila terdapat masalah dan gangguan seputar kamtibmas;
  - e. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan wajib lapor, kelengkapan dokumen pendukung entitas orang asing seperti visa, paspor, kitap (Kartu Ijin Tinggal Tetap) dan sebagainya serta rendahnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pelaporan keberadaan orang asing di wilayah mereka;
  - f. Belum terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sehingga koordinasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) dinilai kurang efisien karena dilakukan dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi yang jangkauan kegiatannya lebih luas dibanding tingkat Kabupaten sehingga penentuan jadwal dan waktu guna pelaksanaan P4GN di Kabupaten Tegal terhambat, akan tetapi di tahun 2020 Badan Kesatuan



Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal telah melakukan kegiatan P4GN berupa rapid test Narkoba dan Zat Adiktif pada sample sekolah di Wilayah Kabupaten Tegal;

g. Belum terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Kabupaten Tegal sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan sehingga pemupukan jiwa nasionalisme dan bela Negara belum maksimal di Wilayah Kabupaten Tegal.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja outcome pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) tercapai 100% (sangat tinggi). Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Capaian kinerja outcome program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indicator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menangani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal.

Capaian kinerja outcome program pendidikan politik masyarakat dengan indicator outcome pertama yaitu Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% dengan rincian yaitu 160 (seratus enam puluh) buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi dalam system data base ormas Kabupaten Tegal.

Pada tahun anggaran 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten tegal menyelenggarakan beberapa kegiatan antara lain kegiatan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Crisis Center dengan kegiatan berupa piket pemantauan situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Wilayah Kabupaten Tegal 24 jam setiap harinya, akan tetapi dengan

adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 menyebabkan hampir seluruh program dan kegiatan Crisis Center dihentikan sejak bulan Mei 2020 yang menyebabkan arus informasi tentang gangguan keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Tegal kurang lancar dan menyeluruh.

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa melalui Penyelenggaraan Peringatan HUT RI ke 75, tahun 2020 upacara HUT RI terselenggara secara virtual di Gedung DPRD Kabupaten Tegal; kegiatan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), melalui kegiatan Pembinaan FKUB maka terealisasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Tegal sehingga tidak terjadi intoleransi di Kabupaten Tegal dan kegiatan yang terakhir ialah Penyelenggaraan Upacara Bela Negara ke 72 tahun 2020 secara virtual yang diikuti Forkompimda dan perwakilan organisasi pemuda di Kabupaten Tegal.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu menjamin stabilitas dan kondusifitas wilayah untuk kelancaran pembangunan. Situasi dan kondisi wilayah berkaitan dengan persoalan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan harus selalu dipantau, melakukan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan hambatan dan gangguan, dan mengambil langkah antisipasi yang diperlukan bersama instansi terkait. Melihat situasi dan kondisi yang ada dan hasil capaian kinerja berdasarkan tolok ukur/indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal masih jauh dari standar pemenuhan kebutuhan dan masih harus dioptimalkan.

Koordinasi dan sinergi program dilakukan, baik dengan instansi horisontal maupun vertikal. Kerjasama dengan instansi horisontal adalah dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Propinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerjasama dengan instansi vertikal dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama

Kabupaten Tegal, Kejaksaan Negeri Slawi, Kepolisian Resort Tegal. Komando Distrik Militer (Kodim) 0712 Tegal dan jajaran TNI lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, serta Badan Intelijen Negara (BIN) Pos Tegal. Sinergi program dengan jajaran kementerian/lembaga di tingkat pusat dilakukan dengan Dirjen Kesbangpol dan Linmas Kemendagri dalam urusan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat; Kementerian Agama dalam urusan pembinaan kerukunan umat beragama; Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan dalam urusan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Polri dan TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban wilayah; Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pembinaan politik dan penyelenggaraan Pemilu; dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam urusan intelijen, deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang diagendakan setiap bulan juga telah dilaksanakan dengan tertib mengingat Forum ini berguna sekali untuk para pimpinan daerah di Kabupaten Tegal berkoordinasi terkait penyebaran Covid-19, gangguan ketertiban dan keamanan serta upaya penanggulangan radikalisme di wilayah Kabupaten Tegal.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tergantung pada kondisi internal dan eksternal yang dihadapi. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan tugas dari sisi internal sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya adalah kelemahan sumberdaya baik manusia, sarana dan prasarana, teknologi, pengetahuan serta dana yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan. Permasalahan dan hambatan eksternal yang cukup menonjol antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya krisis jatidiri, ideologi, dan karakter dengan semakin mudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan pengaktualisasian 4 (empat) pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan masyarakat.
2. Meningkatnya radikalisasi agama dan potensi konflik intra dan antar umat beragama yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan mengganggu kemandirian dan ketertiban masyarakat.

3. Meningkatnya perkembangan jaringan/kelompok radikal/gerakan separatis di Indonesia termasuk wilayah Kab. Tegal, misalnya dengan adanya kegiatan rekrutmen dan keberadaan warga untuk menjadi anggota kelompok radikal.
4. Kewaspadaan terhadap orang asing dan kegiatannya, mulai banyak Warga asing datang dan bekerja disektor industry maupun jasa di Kabupaten Tegal ( perlu pemantauan warga asing ).
5. Pengaruh globalisasi dan liberalisasi yang menyebabkan perubahan budaya yang sangat cepat dan masif di masyarakat Indonesia. Dampak negatif yang diterima adalah rusaknya sendi-sendi budaya adiluhung bangsa yang menyebabkan masyarakat Indonesia rentan akan konflik sosial.
6. Sistem dan budaya politik yang belum mapan dan stabil, sebagai konsekuensi dari masa peralihan dari demokrasi di Era Orde baru ke Era Reformasi yang banyak menimbulkan masalah dan konflik antar kelompok dan golongan.

Permasalahan dan hambatan tersebut berdampak pada belum tercapainya semua target yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal 2019-2024 yang otomatis berdampak pada belum optimalnya pencapaian sasaran visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah ke depan antara lain:

1. Kemajuan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masyarakat yang semakin kritis dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Semakin lancar dan derasnya arus informasi dengan berbagai media, di satu sisi dapat menjadi alat kontrol terhadap pelayanan yang diberikan instansi pemerintah, dan di sisi lain dapat pula dimanfaatkan untuk lebih mengintensifkan komunikasi dan informasi instansi pemerintah kepada masyarakat.

4. Semakin tingginya beban anggaran pemerintah daerah untuk Belanja Tidak Langsung yang menyebabkan alokasi untuk Belanja Langsung semakin sedikit. Hal ini mendorong instansi pemerintah untuk lebih efisien dalam melakukan belanja operasional agar dana yang ada dapat mencukupi kebutuhan program dan kegiatan.
5. Reformasi birokrasi dan tuntutan peraturan perundang-undangan agar instansi pemerintah melakukan Pelayanan Prima, yaitu pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6. Meningkatnya suhu politik nasional dampak dari hasil pemilihan umum.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan, latar belakang permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi, maka isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang perlu dilakukan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 yaitu:

1. Penguatan organisasi/pengembangan institusi (*organisational strenghtening/institutional development*) dengan langkah-langkah :
  - a. Pembenahan manajemen SDM (kepegawaian) dengan meningkatkan kompetensi pejabat struktural dan staf melalui pendidikan dan pelatihan;
  - b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai terutama peralatan kantor sesuai standar kebutuhan minimal;
2. Peningkatkan kuantitas dan kualitas program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, terutama dalam isu pendidikan karakter bangsa, ideologi negara, dan nasionalisme.
3. Peningkatkan kuantitas dan kualitas program dan kegiatan di bidang politik dalam negeri terutama pada isu pendidikan politik baik kepada masyarakat, Ormas, LSM maupun Partai Politik.
4. Peningkatkan kuantitas dan kualitas program dan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat terutama pada isu meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadan, deteksi dini dan antisipasi terhadap gangguan keamanan dan keteriban masyarakat.

#### **2.4. Review Rancangan Awal Perangkat Daerah**

Capaian kinerja outcome pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) tercapai 100% (sangat tinggi). Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Capaian kinerja outcome program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indicator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat. Indikator keduanya adalah jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menagani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal.

Capaian kinerja outcome program pendidikan politik masyarakat dengan indicator outcome pertama yaitu Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% dengan rincian yaitu 160 buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi dalam system data base ormas Kabupaten Tegal. Tabel Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2020 (terlampir)

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Proses pengumpulan usulan dari para pemangku kepentingan dilakukan dengan melakukan diskusi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan secara simultan, tanpa mengagendakan forum khusus untuk menampung aspirasi. Para pemangku kepentingan (*stake holders*) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal antara lain Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda, Agama, Profesi dan Fungsional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai Politik, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kerukunan dan Kesatuan Bangsa (FKKB), Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK), Pengawasan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pakem), dan Komunitas

Intelejen Daerah (Kominda). Dalam setiap kesempatan pertemuan antara Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan para pemangku kepentingan tersebut usulan-usulan program dan kegiatan diajukan.

Usulan yang masuk secara umum adalah agar program dan kegiatan yang mendukung aktifitas para pemangku kepentingan tersebut dapat ditingkatkan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan, peran dan fungsi mereka dalam pembangunan. Hal ini wajar terjadi karena program dan kegiatan yang dilakukan selama ini masih jauh dari kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan. Semua usulan program dan kegiatan yang diajukan sesuai dengan isu-isu penting Perangkat Daerah, namun usulan tersebut baru bersifat umum dan belum sampai pada bentuk kegiatan yang definitif dan terperinci.

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan rencana kerja tersebut harus mengarah pada prioritas pencapaian target dan sasaran perencanaan di tingkat Pusat (RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional), Provinsi (RPJP Provinsi Jawa Tengah 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Tengah 2018–2023, RKPerangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2019) dan Kabupaten (RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 dan RKPerangkat Daerah Kabupaten Tegal 2021).

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal adalah:

1. Menjabarkan dan mengimplementasikan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal, yaitu Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Perlindungan Masyarakat, Didukung Masyarakat Yang Demokratis Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum, melalui misi: 1) Melaksanakan perumusan dan penyiapan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang kesatuan bangsa; 2) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga; 3) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi dibidang perlindungan masyarakat; dan 4) Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten.
2. Menguraikan rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal pada tahun 2022 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tegal.
3. Sebagai tolok ukur dan indikator penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal yang mencakup penilaian masukan (*input*),



keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) pada akhir tahun pelaksanaan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja SKPerangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal adalah:

1. Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa;
2. Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan;
3. Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pemantapan ideologi negara;
4. Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan ketahanan bangsa;
5. Meningkatnya akurasi dan validasi data , mediasi dan fasilitasi hubungan lembaga legislatif dan eksekutif;
6. Meningkatnya akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
7. Meningkatnya akurasi dan validasi data , mediasi dan fasilitasi hubungan lembaga penyelenggara pemilu;
8. Meningkatnya mediasi dan fasilitasi hubungan pelaksanaan pengembangan demokrasi;
9. Meningkatnya mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban dan hak asasi manusia;
10. Meningkatnya koordinasi dalam rangka pengkajian, fasilitasi dan penanganan masalah aktual;
11. Meningkatnya perumusan hasil pengkajian masalah aktual dan rencana tindak lanjutnya;
12. Meningkatnya pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/riset/penelitian/PKL/KKN;
13. Meningkatnya fungsi dan peranan Kominda;

14. Meningkatnya wawasan, pengetahuan, kesiapan , kewaspadaan dan ketrampilan hansip/linmas/hansip inti dalam bidang Kamtramtibmas dan kemungkinan munculnya ATHG serta penanggulangan bencana;
15. Meningkatnya kewaspadaan dan kemampuan rakyat dan hansip/linmas terhadap kemungkinan munculnya ATHG;
16. Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bela negara;
17. Meningkatnya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Penyusunan rumusan program dan kegiatan Tahun 2022 mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pencapaian visi dan misi daerah di bidang keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial (angka kriminalitas).
2. Peningkatan intensitas Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri (terorisme, separatisme dan radikalisme agama).
3. Peningkatan dinamika politik masa Pandemi Covid-19.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 terdapat 6 (enam) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan. Dari program dan kegiatan tersebut, terdapat 1. Program rutin/penunjang yaitu :

- Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian Dan Perencanaan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yang diantaranya :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Penyebaran lokasi kegiatan mencakup hampir seluruhnya di wilayah Kabupaten Tegal kecuali kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah. Kelompok masyarakat sasaran adalah para pemangku kepentingan (*stake holder*) sebagai penerima manfaat langsung kegiatan. Rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal KUA PPAS sebesar Rp. **4.718.273.700,-** (*Empat milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*). Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal (Terlampir)

## BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk implementasi transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan adanya dokumen Renja Perangkat Daerah ini masyarakat sebagai subyek pembangunan dapat ikut berpartisipasi dalam mengawal dan menilai kinerja pelayanan instansi pemerintah dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*)

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, namun karena adanya keterbatasan kemampuan daerah, maka dengan terpaksa pada Renja Tahun 2022 ini tidak semua program dan kegiatan yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Hal ini perlu mendapat perhatian kita semua, karena masalah ini adalah masalah yang harus dilihat secara menyeluruh dan lintas sektoral. Peningkatan kemampuan pembiayaan daerah dalam pembangunan dan peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan agar alokasi dana untuk

pembangunan mencukupi kebutuhan yang ada. Hal ini perlu disadari oleh para pemangku kepentingan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Tegal agar didapatkan pemahaman bersama dan kerjasama dalam mencari solusi terbaik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini kami susun, semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kabupaten Tegal,



**Drs. ABASARI, M.HUM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19631029 198503 004



Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Praktik Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
												Tolok Ukur	Target
8 01 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	25 Orang 1 tahun	100 %	40.000.000,00			40.000.000,00	
8 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							131.000.000,00				133.100.000,00	
8 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	1 Paket 10 buah	100 %	4.000.000,00			4.400.000,00	
8 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	1 Paket	100 %	25.000.000,00			27.500.000,00	
8 01 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	1 Paket 23 Item	100 %	7.000.000,00			7.700.000,00	
8 01 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	1 Paket 1 tahun	100 %	27.000.000,00			29.700.000,00	
8 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	1 Paket 1 tahun	100 %	10.000.000,00			11.000.000,00	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Praktis Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
											Tolok Ukur	Target
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacuan dan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Dokumen Badan Bacuan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacuan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	24 Dokumen 1 tahun	100 %	3.000.000,00		3.300.000,00	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	10 Laporan 1 tahun	100 %	48.000.000,00		49.500.000,00	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								280.773.700,00		20.000.000,00	
8 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat		Kab. Tegal, Slawi		1 unit		260.773.700,00			
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Mebel yang tersedia	Tersedianya Mebel	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	1 Paket 1 tahun	100 %	10.000.000,00		10.000.000,00	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	1 Paket 1 tahun	100 %	10.000.000,00		10.000.000,00	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								161.000.000,00		177.100.000,00	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	1 Laporan 100 buah	100 %	1.000.000,00		1.100.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keharusan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp-)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keharusan Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersevidnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	48 Laporan 1 tahun	100 %	40.000.000,00			44.000.000,00
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersevidnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	1 Laporan 1 tahun	100 %	120.000.000,00			132.000.000,00
8 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersevidnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	14 Unit 1 tahun	100 %	100.000.000,00			110.000.000,00
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	1 tahun	100 %	5.000.000,00			5.000.000,00
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tegal, Slawi, Slawi, Wetan	100 %	1 tahun	100 %	10.000.000,00			30.000.000,00
8 01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>											
8 01 02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KERANGSAAN</b>											
									2.420.000.000,00			2.822.650.000,00
									340.000.000,00			350.000.000,00

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	TARGET CAPAIAN KINERJA	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Paga Indikatif (Rp.)
						Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	TARGET	
8 01 02 2.01	Perencanaan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								350.000.000,00		350.000.000,00
8 01 02 2.01 04	Pelembagaan Koordinasi di Bidang Ideologi Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prosesnya masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pegai, Siawi, Siawi Wetan	100 %	330 Orang 4 Kegiatan	100 %	350.000.000,00		350.000.000,00
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								1.207.650.000,00		1.207.650.000,00
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Peningkatan Situasi Politik								1.207.650.000,00		1.207.650.000,00

Kode	Usana/ Bidang Usana Peningkatan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prkiraan Maja Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluhan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Ukur	Target Capaian Kinerja
8 01 03 2.01 03	<p>03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Penguatan Kemandirian, Peningkatan dan Peran Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peningkatan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Proses dan Partisipasi yang Mendorong Pelaksanaan Pendidikan Politik; Promosi partai yang melaksanakan pendidikan politik masyarakat</p>	<p>Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Penguatan Kemandirian, Peningkatan dan Peran Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peningkatan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Penguatan Kemandirian, Peningkatan dan Peran Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peningkatan Situasi Politik di Daerah</p>	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	11 parial politik 798.710 suara suh	100 %	1.207.650.000,00	1.207.650.000,00
8 01 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>									
8 01 04 3.01	<p>Perumusan Kebijakan Penguatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>prosentase ormas yang terbita</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Atang di Daerah yang Disusun</p>	<p>Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Atang di Daerah</p>	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	24 Dokumen	100 %	180.000.000,00	180.000.000,00
8 01 04 2.01 02	<p>Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Atang di Daerah</p>	<p>prosentase ormas yang terbita</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Atang di Daerah yang Disusun</p>	<p>Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Atang di Daerah</p>	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	24 Dokumen	100 %	180.000.000,00	180.000.000,00
8 01 05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEREMBANGKAR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>									
8 01 05 2.01	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Penguatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<p>prosentase ormas yang terbita</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Atang di Daerah yang Disusun</p>	<p>Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Atang di Daerah</p>	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	24 Dokumen	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Praktik Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keteruan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp-)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyakit Perilaku Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Perghayatan Keperayaan di Daerah	Presentase konflik yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyakit Perilaku Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Perghayatan Keperayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyakit Perilaku Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Perghayatan Keperayaan di Daerah	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	1.793 Orang	100 %	250.000.000,00		250.000.000,00	
8 01 06	<b>PROGRAM PERBUKTIAN KESIMPADAN MASYARAKAT DAN PERBUKTIAN KUALITAS DAN FASILITAS PEMERINTAH KEMUNGKINAN KONFLIK SOSIAL</b>						432.350.000,00				815.000.000,00	
8 01 06 2.01	Perencanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										815.000.000,00	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kelembagaan dan Penanganan Konflik di Daerah	Presentase gangguan keamlahan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kelembagaan dan Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kelembagaan dan Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	1220 Orang	100 %	140.000.000,00		500.000.000,00	
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase gangguan keamlahan yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Terkumpulnya Rapat	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan	100 %	12 Dokumen	100 %	292.350.000,00		315.000.000,00	